

**FUNGSI DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2019
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Srifaaini

1810012111174

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

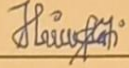
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : SRIFAAINI
Nomor : 1810012111174
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Periode
2014 -2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Dua Empat Bulan Juli Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr.Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

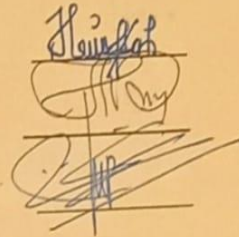
PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : SRIFAAINI
Nomor : 1810012111174
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Periode
2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Kamis Tanggal Dua Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua)
2. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FUNGSI DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2019 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Srifaaini¹, Dr.Maiyestati,S.H.,M.H¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: srifaaini4@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk membentuk peraturan daerah (perda). Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dilengkapi pula dengan fungsi legislatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah fungsi DPRD Periode 2014-2019 dalam menyusun peraturan Daerah Kuantan Singingi ? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi DPRD Periode 2014-2019 dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi ? 3) Apa sajakah upaya DPRD mengatasi kendala-kendala dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi ? Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara, analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah 1) Fungsi DPRD kuantan singingi periode 2014-2019 belum berfungsi dengan baik keaktifan anggota DPRD dalam pembahasan raperda 2) Kendala di hadapi DPRD kuantan singingi hak inisiatif belum dapat terlaksanakan secara optimal 3) Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan DPRD harus sering turut ke masyarakat untuk menggali persoalan-persoalan yang dhadapi masyarakat.

Kata Kunci : Fungsi DPRD, Peraturan Daerah,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A..Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1. Pengertian Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	13
2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	13
3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	17
4. Lembaga Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	18
5. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	23
B.Tinjauan Peraturan Daerah	
1. Otonomi Daerah	26
2. Rancangan Peraturan Daerah	32

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.....	33
4. Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah	33
5. Prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2014-2019 Dalam Menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi	43
B. Kendala Kendala Yang Dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2014-2019 Dalam Menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi	47
C. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mengatasi Kendala Kendala Dalam Menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi	49

BAB IV PENUTUP

A.Simpulan	54
B.Saran	55

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN